

**ABSTRAK**

Penulis ini fokus pada tanggung gugat penyelenggara haji yang menggunakan kuota negara lain yang membuat konsumen sebagai calon jemaah haji dirugikan. Banyak calon jemaah haji yang tidak mengetahui cara untuk memperjuangkan haknya yang dilanggar oleh biro perjalanan sebagai pelaku usaha. Bentuk perlindungan yang di dapat calon jemaah haji jika mengalami kerugian yang disebabkan pelaku usaha. Penelitian ini mengajukan dua pertanyaan untuk dijawab, yakni: 1) Tanggung gugat biro perjalanan terhadap konsumen atas kegagalan pemberangkatan jemaah haji khusus? 2) Apakah pemerintah Republik Indonesia memberikan perlindungan hukum kepada jemaah haji yang menggunakan kuota negara lain?.

Metode penulisan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penulisan menggunakan pendekatan masalah dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah serta metode penelitian sebagaimana disebutkan di atas menunjukan bahwa tanggung gugat penyelenggara haji berdasarkan pada pasal 19 undang-undang perlindungan konsumen. Sedangkan perlindungan hukum kepada jemaah haji yang menggunakan kuota negara lain pemerintah tidak memberikan perlindungan

Keyword: Tanggung gugat, penyelenggara ibadah haji, kuota negara lain

**ABSTRACT**

These writers focus on accountability the you use the quota other countries which make consumers as candidate haji wronged .Many candidate hajj not figure out how to fight for their rights of being violated by the bureau travel as business players .The form of perlindungan who in be candidate haji if a loss of caused business players .This research proposed two the answer , namely: 1 accountability travel agents to consumer for failure departure the assembly haji special ? 2 whether the central government of indonesia provide legal protection to the assembly you use the quota other countries ? .A method of writing used to answer formulation problems in this research was uses the method of writing use an approach to a problem with the approach and regulations ( statute approach ) and approach conceptual ( conceptual approach ) .The results of the study based on the background and joint matter, Problems and research methodology as mentioned above showed that accountability the haji based on article 19 the act of consumer protection .While legal protection to the assembly you use the quota other countries government do not provides protection

Keyword: accountability , the hajj , the quota other countries